



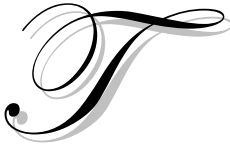
LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA BANJARMASIN

2024



KATA PENGANTAR

 erselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Dalam penjelasan Undang-Undang dirumuskan bahwa azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Kinerja Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ/2022 tanggal 24 Januari 2022 Tentang Bentuk, Isi dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin merupakan laporan kinerja yang dibuat secara periodik sebagai pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi DJP yang dilaksanakan selama tahun 2024. Laporan akuntabilitas ini merupakan sarana mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dari unit eselon III kepada unit eselon II di atasnya yaitu Kantor Wilayah.

Secara eksternal LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*. Sedangkan secara internal, LAKIN merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tidak lepas dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan visi “ **Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan**” serta misi “**Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi**”

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan disektor perpajakan diperlukan kemampuan memberikan pelayanan prima dan transparansi yang akan mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak memegang peranan penting. Pajak sebagai andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan akan disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya dalam penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian misi dan visi tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Tahun 2024.

Penyusunan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan terhadap tercapainya target sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2024.

Banjarmasin, 23 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
Devyanus Christofel Narsizzus Polii



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran.....	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Wewenang dan Tanggungjawab	4
E. Sistematika Pelaporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Penetapan Kinerja tahun 2024.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Capaian IKU KPP Pratama Banjarmasin Tahun 2024
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja KPP Pratama Banjarmasin Tahun 2024
3. Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Banjarmasin Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF



asasan atau target yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tidak lepas dari misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Visi, misi, dan sasaran harus diketahui, dipahami, dihayati oleh segenap jajaran dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah yang merupakan pedoman dalam bertindak dibidang tugas masing-masing. Dari pernyataan visi dan misi mengandung pengertian yang benar-benar harus dihayati oleh segenap jajaran dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dalam mencapai target sasaran yaitu tercapainya rencana penerimaan pajak tahun 2024.

Rencana penerimaan pajak yang ditargetkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tahun 2024 adalah sebesar Rp1.632.190.731.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.633.895.813.257,00 atau sebesar 100,10% yang terdiri dari :

Jenis Pajak	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
A. PPh Non Migas	927.868.485.000	944.341.839.384
B. PPN dan PPnBM	665.417.162.000	646.981.935.391
C. PBB	12.988.976.000	14.609.907.736
D. Pajak Lainnya	24.416.108.000	27.962.130.746
TOTAL	1.632.190.731.000	1.633.895.813.257

1. Tujuan dan Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dituangkan dalam Rencana Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Rencana Kinerja tersebut merupakan target yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian Kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2024**

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Awal Tahun	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,10%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	106,91
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,10%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	108,04%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,11%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	108,82%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	119,73%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	116,40%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200%
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	94%

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Awal Tahun	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,50
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96,05
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	98,20
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

2. Kendala yang Dihadapi

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin menghadapi sejumlah kendala terutama dalam upaya menghimpun penerimaan negara. Kendala-kendala tersebut menyebabkan beberapa Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tercapai namun tidak optimal. Adapun beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil survei kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak merupakan hasil murni dari pengisian survei oleh Wajib Pajak.
- b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT belum maksimal.
- c. Perencanaan penerimaan kas yang belum optimal.
- d. Pelemahan pasar komoditas terutama batubara dan sektor penunjangnya.
- e. Peningkatan restitusi di tahun 2024.
- f. Kemampuan bayar penanggung pajak rendah.
- g. Potensi dari Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan belum mencukupi untuk pemenuhan target PKM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, tidak hanya dalam hal ekonomi, tapi mencakup banyak aspek dalam masyarakat. Momen-momen yang terjadi dalam tahun 2024 yang telah dilakukan dalam percepatan perbaikan ekonomi nasional, KPP Pratama Banjarmasin yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah untuk semakin mudah dan cepat dalam beradaptasi dan mengembangkan potensi daerah untuk memberikan dukungan penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dalam memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan program dalam kebijakan rencana strategis DJP. Sasaran dan program tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tahunan dan dievaluasi pada akhir periodenya. Setiap rencana kinerja telah sedemikian rupa dimitigasi risikonya dan atas kehendak Tuhan, pada tahun 2024 target yang diamanahkan ke KPP Pratama Banjarmasin telah terpenuhi dengan capaian 100,10%.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan yang secara periodik dibuat sebagai pertanggung jawaban atas sasaran dan realisasi dari program kerja yang telah ditetapkan oleh DJP. Laporan akuntabilitas ini juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yakni tahun 2024 dari eselon III (Kepala KPP Pratama Banjarmasin) kepada eselon II (Kepala kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah). Selain itu, LAKIN merupakan alat kendali dan wujud transparansi pelaksanaan tugas KPP Pratama Banjarmasin dalam rangka menuju terwujudnya good governance dan memacu peningkatan kinerja di KPP Pratama Banjarmasin.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan disektor perpajakan diperlukan kemampuan memberikan pelayanan prima dan transparansi yang akan mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak memegang peranan penting. Pajak sebagai andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan akan disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya dalam penyelenggaraan negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian misi dan visi DJP, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Tahun 2024. Penyusunan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan terhadap tercapainya target sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2024.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

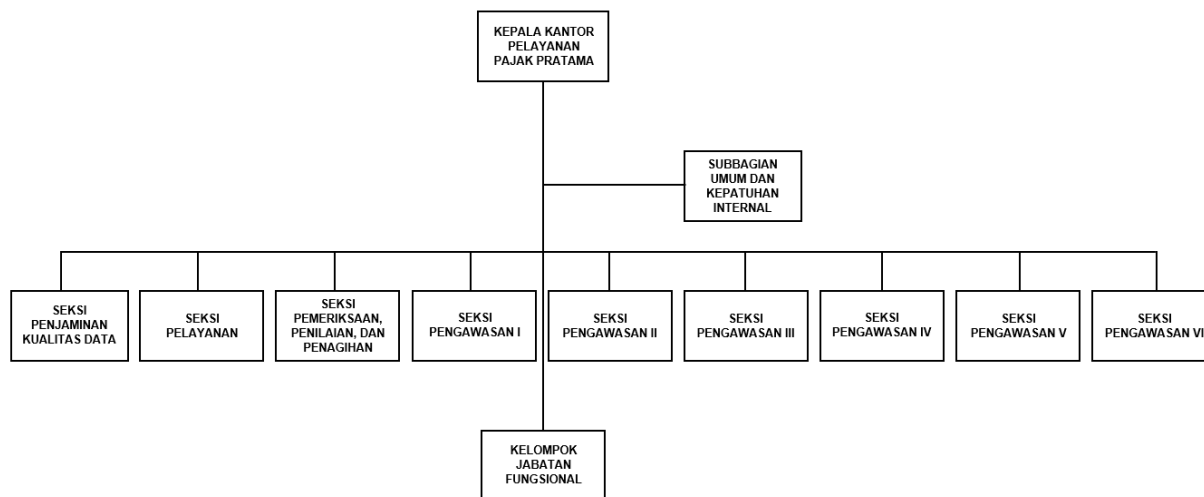
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelayanan perpajakan;
- f. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- g. pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- k. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. pembetulan ketetapan pajak pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan pajak bumi dan bangunan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala KPP Pratama;
- b. Subbagian Umum dan KI;
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- f. Seksi Pengawasan I;
- g. Seksi Pengawasan II;
- h. Seksi Pengawasan III;
- i. Seksi Pengawasan IV;
- j. Seksi Pengawasan V; dan
- k. Seksi Pengawasan VI.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin



Untuk saat ini per tanggal 31 Desember 2024 SDM yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah 90 orang pegawai. Sedangkan unit kerja operasional atau kantor pelayanan yang berada dibawah koordinasi langsung Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marabahan memiliki 3 orang pegawai.

D. Wewenang dan Tanggung Jawab

Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta sistem keterbukaan dewasa ini menuntut dilakukan adanya perubahan-perubahan, utamanya perubahan dalam pola pikir (*mind set*) dan organisasi untuk menuju *good governance*. Begitu pula halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak telah terjadi perubahan dalam struktur organisasinya. Pengembangan organisasi ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam tahun pajak 2024 ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp1.632.190.731.000,00. Disinilah perlunya peran serta dan dukungan dari seluruh pegawai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Banjarmasin untuk turut serta mendukung pencapaian target yang dibebankan tersebut.

E. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini menginformasikan dan mengomunikasikan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 dibandingkan dengan penetapan/target kinerja 2024. Hal tersebut berfungsi sebagai tolok ukur (benchmark) keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performonce gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah nomor ND-94/WPJ.29/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - c. standar nasional (jika ada);
 - d. terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar di sertakan pula raw data.
3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin memikul beban tanggung jawab serta peran yang sangat strategis, yaitu:

"Mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri".

Rencana strategis merupakan suatu proses untuk mewujudkan Laporan Kinerja (LAKIN) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun (1-5 tahun).

Rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tidak terlepas dari visi, dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah. Dalam tahun pajak 2024 rencana kinerja untuk pencapaian target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sebesar Rp1.632.190.731.000,00 yang terdiri dari :

Jenis Pajak	Rencana (Rp)
A. PPh Non Migas	927.868.485.000
B. PPN dan PPnBM	665.417.162.000
C. PBB	12.988.976.000
D. Pajak Lainnya	24.416.108.000
TOTAL	1.632.190.731.000

Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

“ Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”

Misi

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam

berbagai bidang dalam lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

T u j u a n

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Tujuan yang ingin dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah ikut menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi di Wilayah Banjarmasin dan Barito Kuala.

Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin pada tahun anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara yang optimal dari sektor pajak, serta terwujudnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Terbitnya PMK 184/PMK.01/2020 hal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan perubahan nama dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Utara menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, serta perubahan nama seksi yang terdampak penerapan PMK 184/PMK.01/2020. Oleh karena itu dibuat Kontrak Kinerja Komplemen atas Penetapan kinerja awal tahun agar dapat menggambarkan kondisi terbaru capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Rencana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk LAKIN. Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Awal Tahun
(1)	(2)	(3)
Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Membandingkan antara target awal tahun, target *addendum* dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target awal tahun dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Awal Tahun	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,10%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	106,91
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,10%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	108,04%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,11%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	108,82%

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Awal Tahun	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	119,73%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%
	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	116,40%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200%
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	94%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,50
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96,05
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	98,20
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.3

PERBANDINGAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2022	Capaian 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase realisasi penerimaan pajak	120,00%	103,08%	100,10%	100,10%
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	109,43%	118,90		
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			106,91	106,91%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	120,00%	101,65%	100,10%	100,10%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	106,10%	102,81%	108,04%	108,04%

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2022	Capaian 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	105,58%	120%	100,11%	100,11%
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%	120%		
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			88,80%	120%
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	110,03%	110,30%		
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan			108,82%	108,82%
Persentase pengawasan pembayaran masa	120,00%	120%	119,73%	120%
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	120%	120,00%	120%
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120,00%	120%	120,00%	120%
Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	110,15%	118,53%		
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			120%	120%
Efektivitas Penagihan	120,00%	120%	116,40%	120%
Tingkat efektivitas Pemeriksaan	120,00%	120%		
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian			120%	120%
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			200%	120%
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00%	120%		
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan			120%	120%
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	120%	94%	120%
Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	120,00%	120%		
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	111,11%	111,11%		
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM			117,50	117,50
Indeks Penilaian Integritas Unit	110,21%	112,06%	96,05	113
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko			98,20	109,11
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	97,57%	120%		
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran			120	120

3. Upaya-upaya *Extra Effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin telah memberikan layanan yang terbaik bagi Wajib Pajak, kegiatan yang dilakukan tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi. Usaha yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pemberian layanan kepada Wajib Pajak melalui Whatsapp;
- b. Sosialisasi peraturan baru dan kelas pajak secara online melalui aplikasi Zoom dan offline (tatap muka);
- c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak melalui sosial media resmi KPP Pratama Banjarmasin ataupun dengan Layanan di Luar Kantor (LDK);
- d. Pelaksanaan konseling dan konfirmasi terkait data Wajib Pajak;
- e. Melakukan *visit* dan pengamatan kepada wajib pajak untuk mengetahui proses bisnis dan potensi pajak;

4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang telah berhasil diwujudkan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada uraian berikut ini:

1. Terdapat IKU yang tidak dapat dikontrol, karena menggunakan mekanisme pengambilan survey dari responden/wajib pajak yaitu Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dan indeks penilaian integritas unit. Atas IKU tersebut pimpinan unit meminta untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan ke pada Wajib Pajak.
2. Atas IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi, pimpinan unit meminta agar setiap pengawas agar mengkoordinir dan mengadakan

persiapan baik pribadi masing-masing pegawai dan kelompok belajar (mentoring) untuk menghadapi Ujian Kompetensi. Sehingga seluruh peserta ujian dapat memenuhi kriteria kelulusan Ujian Kompetensi.

3. Mempertahankan kinerja IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan menjalin koordinasi kepada pihak ketiga, misalnya ILAP, dan meningkatkan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK).
4. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak akan di persiapkan lagi daftar sasaran wajib pajak yang akan diperiksa oleh Seksi Pengawasan secara tepat waktu dan menghasilkan ketetapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

5. Efisiensi penggunaan sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

KPP Pratama Banjarmasin mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk tetap memaksimalkan kinerja dalam upaya mencapai target organisasi.

b. Keuangan

Efisiensi dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Banjarmasin tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.811.178.000,00 dengan Realisasi penyerapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.624.652.493,00 atau 96.79% dari jumlah anggaran.

6. Analisis Program/kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Banjarmasin yang berhasil menunjang kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Layanan konsultasi Wajib Pajak melalui Whatsapp

Kegiatan ini dapat mempermudah Wajib Pajak bila ingin berkonsultasi dengan Account Representative (AR) terkait kewajiban perpajakan sehingga tidak perlu datang ke KPP Pratama Banjarmasin , kegiatan ini dinilai efektif dilihat dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan

Orang Pribadi dengan target sebesar 100% dan berhasil meraih capaian sebesar 108,04%.

2. Melakukan himbauan dan konseling penyelesaian piutang pajak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat membantu Wajib Pajak yang berniat melunasi piutang pajak yang bersangkutan sehingga proses penagihan dapat berjalan lancar, kegiatan ini dinilai efektif dilihat dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat efektivitas penagihan dengan target sebesar 75% dan berhasil meraih capaian sebesar 116,40%.

3. Memberikan *feeding* berita dan kabar terbaru terkait KPP Pratama Banjarmasin melalui media sosial

Penyampaian berita dan kabar terbaru melalui media sosial resmi KPP Pratama Banjarmasin kepada Wajib Pajak perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber edukasi dan penyampaian informasi terkait layanan umum, sosialisasi, serta konsultasi. Kegiatan ini dinilai efektif dilihat dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan target sebesar 100% dan berhasil meraih capaian sebesar 108,82%

4. Meningkatkan peran komite kepatuhan dalam rangka penyusunan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP dan DSP4 kolaboratif dan meningkatkan peran AR dan FPP melalui permohonan bantuan penilaian

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Account Representative (AR) dengan tujuan penggalan potensi atas transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kegiatan ini dinilai efektif dilihat dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dengan target sebesar 100% dan berhasil meraih capaian sebesar 120%.

7. Analisis pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Tercapainya target kinerja suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari keberhasilan memitigasi kejadian risiko atas sasaran strategis pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 atas Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai

Dijalankan KPP Pratama Banjarmasin hasil akhir totalnya sebesar 100%. Tingkat capaian rencana aksi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
RENCANA AKSI YANG SELESAI DIJALANKAN

Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Mengoptimalkan pengawasan oleh AR dengan meningkatkan kunjungan kerja ke Wajib Pajak	100%
	Melakukan Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara penentu penerimaan terkait APBD dan DIPA Instansi Vertikal	100%
	Mengoptimalkan Kegiatan ekstensifikasi sektoral	100%
	Pembuatan rencana atau target dinamisasi PPh pasal 25 berdasarkan sektor prioritas atau tindak lanjut dari faktor-faktor penyebab dinamisasi	100%
	Pengawasan terhadap produktivitas Penerbitan STP yang belum optimal terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar	100%
	melakukan penelitiandata matching yang ada di aplikasi approweb	100%
	Melakukan pengumpulan data trigger yang akan ditindaklanjuti dengan KPDL antara lain data internet secara masal (crawling data), data pelaku digital economy, serta data trigger yang lain	100%
Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	Melakukan Layanan di Luar Kantor (LDK) Melakukan tindak lanjut atas penerbitan SP2DK	100%
	Mengunjungi Wajib Pajak untuk memastikan alamat sehingga mengurangi resiko Surat yang disampaikan ke WP melalui pos tidak sampai kepada WP (kempos)	100%
	Mengunjungi tempat usaha atau domisili Wajib pajak yang tidak merespon SP2DK	100%
	Rapat Komite kepatuhan KPP untuk membahas secara cermat terhadap usulan DSP4	100%
	Komite kepatuhan KPP Menyusun Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam DPP dan melakukan penetapan serta pemutakhiran DPP tepat waktu	100%
	Account Representative tidak Melakukan tindak lanjut atas DPP yang telah ditetapkan (LHP2DK realisasi atau usul pemeriksaan)	100%
	Meneliti dan Menerbitkan SP2DK atas LHA dari Kanwil dan Kantor Pusat	100%
	Melakukan penelitian atas data konkret Wajib Pajak di Approweb	100%
Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT	100%
	Melakukan Layanan di Luar Kantor (LDK)	100%

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak	100%
	Membuat kelas pajak secara rutin	100%
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menindaklanjuti data tahun berjalan	100%
	Membuat dinamisasi PPh pasal 25	100%
Nilai ketetapan SKPKB/SKPLB ditetapkan dengan nilai yang tidak seharusnya	Menyelenggarakan IHT dengan tema yang berbeda, untuk meningkatkan kompetensi FPP	100%
Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	100%
Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan Rapat pada setiap pengajuan usulan pemeriksaan	100%
Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo	Membuat ND monitoring yang dikirim ke Supervisor untuk mengetahui jumlah tunggakan tiap Tim Pemeriksa	100%
	Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	100%
Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Penandatanganan Komitmen Integritas Pimpinan	100%
	Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Unit Kepatuhan Internal	100%
Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Melakukan IHT/Sosialisasi mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawai	100%

8. Rencana Aksi Tahun 2024

Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dalam upaya menghimpun penerimaan negara selama tahun 2024 tersebut harus terus dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin yang lebih baik lagi. Berkaca kepada kendala-kendala yang terjadi selama tahun 2024, maka langkah antisipatif sebagai strategi pemecahan masalah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pertumbuhan pembayaran baik PPM maupun PKM pada wajib pajak prioritas.
- b. Melakukan himbauan dinamisasi PPh psl 25.

- c. Meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. Mengoptimalkan pengawasan wilayah oleh AR dengan meningkatkan kunjungan kerja ke Wajib Pajak.
- f. Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing.
- g. Mengawasi pertumbuhan pembayaran baik PPM maupun PKM pada wajib pajak prioritas.
- h. Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak.
- i. Membuat kelas pajak dan bimbingan kepada WP yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak.
- j. Peningkatan pengetahuan serta kapabilitas petugas layanan.
- k. Peningkatan kualitas layanan serta kemudahan WP untuk mengakses layanan.
- l. Pemberian penghargaan dan/atau capaian atas kinerja KPP di tempat yang strategis dapat dijangkau oleh Wajib Pajak untuk dapat mengubah persepsi masyarakat.
- m. Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK.
- n. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain.
- o. Setiap atasan melakukan coaching, konseling, dan evaluasi atas kinerja bawahan.
- p. Menyelenggarakan evaluasi terkait pelaksanaan tugas pegawai (dapat dilakukan secara bulanan).

B. Realisasi Anggaran

Masalah keuangan telah diatur dan mengacu kepada DIPA yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan berarti. Khusus yang berkaitan dengan hak pegawai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin mengeluarkan kebijakan bahwa pembayaran Gaji dan TKPKN dilaksanakan melalui bank yaitu PT. Bank Mandiri Cab. KCP Banjarmasin Pangeran Samudera. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat serta menyederhanakan proses administrasi juga mengarahkan pegawai untuk sadar menabung sehingga tumbuh pola hidup sederhana.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pengamanan penerimaan disatu sisi, namun anggaran yang tersedia semakin terbatas disisi lain, maka disiplin anggaran akan menjadi perhatian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang sangat terbatas itu dapat dioptimalkan penggunaannya pada upaya-upaya yang berimplikasi terhadap pengamanan penerimaan.

Adapun realisasi anggaran belanja untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai mana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

**REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024								
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015			KEMENTERIAN KEUANGAN			Kode Lap : LRA.B.S.2		
ESELON I : 04			DITJEN PAJAK			Tanggal : 23/01/25 2:54 PM		
WILAYAH/PROVINSI : 240			KALIMANTAN SELATAN			Halaman : 1		
SATUAN KERJA : 119855			KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN			Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc		
JENIS SATUAN KERJA : KD						Tgl Data : 23/1/25 8:54 AM		
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,094,112,000	751,428,000	718,688,000	0	718,688,000	95.64	32,740,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,094,112,000	751,428,000	718,688,000	0	718,688,000	95.64	32,740,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	107,644,000	89,212,000	75,480,000	0	75,480,000	84.61	13,732,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	107,644,000	89,212,000	75,480,000	0	75,480,000	84.61	13,732,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,201,756,000	840,640,000	794,168,000	0	794,168,000	94.47	46,472,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,172,294,000	1,330,447,000	1,328,907,476	0	1,328,907,476	99.88	1,639,524
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	315,530,000	308,829,000	292,765,812	0	292,765,812	94.8	16,063,188
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79,800,000	79,800,000	79,632,000	0	79,632,000	99.79	168,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	248,821,000	263,098,000	260,173,135	0	260,173,135	98.89	2,924,865
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,816,445,000	1,982,174,000	1,961,378,423	0	1,961,378,423	98.95	20,795,577
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	74,896,000	273,116,000	264,018,600	0	264,018,600	96.67	9,097,400
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	384,200,000	390,100,000	362,812,618	0	362,812,618	93.01	27,287,382
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	459,096,000	663,216,000	626,831,218	0	626,831,218	94.51	36,384,782
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	320,108,000	370,297,000	368,656,005	0	368,656,005	99.56	1,640,995
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	320,108,000	370,297,000	368,656,005	0	368,656,005	99.56	1,640,995
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	36,000,000	21,940,000	21,939,640	0	21,939,640	100	360
522112	Belanja Langganan Telepon	149,900,000	168,662,000	167,684,653	0	167,684,653	99.42	977,347
522113	Belanja Langganan Air	2,230,000	6,230,000	6,220,000	0	6,220,000	99.84	10,000
522141	Belanja Sewa	96,477,000	189,708,000	188,106,365	0	188,106,365	99.16	1,601,635
522151	Belanja Jasa Profesi	26,400,000	19,300,000	16,500,000	0	16,500,000	85.49	2,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	47,555,000	47,555,000	43,589,328	0	43,589,328	91.66	3,965,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	358,562,000	453,395,000	444,039,986	0	444,039,986	97.94	9,355,014
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41,309,000	41,309,000	41,308,928	0	41,308,928	100	72
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340,860,000	289,230,000	254,960,858	0	254,960,858	88.15	34,269,142
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	387,169,000	335,539,000	301,269,786	0	301,269,786	89.79	34,269,214
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,130,816,000	1,005,317,000	964,151,075	2,254,500	961,896,575	95.68	43,420,425
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	356,817,000	151,917,000	135,520,000	0	135,520,000	89.21	16,397,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,487,633,000	1,157,234,000	1,099,671,075	2,254,500	1,097,416,575	94.83	59,817,425
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,829,013,000	4,961,855,000	4,801,846,493	2,254,500	4,799,591,993	96.73	162,263,007
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	28,638,000	28,638,000	0	28,638,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	28,638,000	28,638,000	0	28,638,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	28,638,000	28,638,000	0	28,638,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	6,030,769,000	5,831,133,000	5,624,652,493	2,254,500	5,622,397,993	96.42	208,735,007

Ket : Realisasi Anggaran untuk BA 2024

BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Laporan ini merupakan laporan yang merefleksikan kondisi dan capaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin pada tahun 2024. Dalam rangka menjalankan visi misi Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai memaksimalkan potensi terbaiknya dan profesional, integritas dan bersinergi dalam melaksanakan tugas sehingga tercapai Nilai Kinerja Organisasi 110,12% dengan realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp 1.633.895.813.257,00 dengan capaian 100,10%.

Dalam upaya mencapai target Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu dalam menghadapi tuntutan Reformasi di segala bidang dan dalam rangka memasuki era gubalisasi dan transparansi;

Mengembangkan sistem informasi dan teknologi basis data guna mapping Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga terwujud perkembangan pengetahuan masyarakat khususnya dalam bidang perpajakan;

Optimalisasi rencana penanganan (mitigasi) risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahun berikutnya.

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KPP KPP PRATAMA BANJARMASIN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,91	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,91
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,78
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,04%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,04
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,11
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,11%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,11
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,88
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,41
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,82%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,82
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,73%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	116,40%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	94,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,60
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,19
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,05	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,12

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KPP PRATAMA BANJARMASIN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP																					
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak																						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	100.00%	1.632.190.731.000	100.10%	1.633.900.386.257	0.10%																					
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyekti perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$	100		106.91		6.91																					
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	100.00%	1.485.931.299.000	100.10%	1.487.487.807.722	0.10%																					
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[\frac{(1,3 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selanj yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$	100.00%		108.0%		8.04%																					
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	100.00%	146.259.432.000	100.11%	146.413.076.535	0.11%																					
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\text{IKU EP} = ((25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar}))$	74.00%		88.80%		14.80%																					
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei	100.00%		108.82%		8.82%																					
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	90.00%		116.20%		26.20%																					
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	100.00%		120.00%		20.00%																					
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	$(\text{Capaian pemanfaatan data STP}) + (\text{Capaian pemanfaatan Data Matching})$	100.00%		116.69%		16.69%																					
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyipan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	100.00%		120.00%		20.00%																					
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$	100.00%		120.00%		20.00%																					
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Pengamahan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	75.00%		116.40%		41.40%																					
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$	100.00%		120.00%		20.00%																					
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$	100.00%		119.41%		19.41%																					
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$\left(70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang bendatuk lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right) + \left(30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang bendatuk lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right)$	55.00%		94.00%		39.00%																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtintan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$	100		117.5		17.5																					
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$	85.00%		96.05%		39.00%																					
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90		98.20		8.20																					
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x HKPA dengan nilai HKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x HKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (Indeks 100) <table><thead><tr><th>Indeks Tw IV</th><th>Formula Konversi Tw IV</th><th>Konversi Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>100</td><td>Realisasi HKPPA = 90,00</td></tr><tr><td>$100 < X < 120$</td><td>$100 + \left(\frac{\text{Realisasi HKPPA} - 90}{10} \right) \times 2$</td><td>$(91,00 - \text{Realisasi HKPPA}) \times 0,001$</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>Realisasi HKPPA = 91,00</td></tr><tr><td>$80 < X < 100$</td><td>$80 + \left(\frac{\text{Realisasi HKPPA} - 80}{20} \right) \times 0,55$</td><td>$(80,00 - \text{Realisasi HKPPA}) \times 0,001$</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td><td>Realisasi HKPPA = 80,00</td></tr><tr><td>70</td><td>70</td><td>Realisasi HKPPA = 70,00</td></tr></tbody></table>	Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Konversi Indeks	100	100	Realisasi HKPPA = 90,00	$100 < X < 120$	$100 + \left(\frac{\text{Realisasi HKPPA} - 90}{10} \right) \times 2$	$(91,00 - \text{Realisasi HKPPA}) \times 0,001$	100	100	Realisasi HKPPA = 91,00	$80 < X < 100$	$80 + \left(\frac{\text{Realisasi HKPPA} - 80}{20} \right) \times 0,55$	$(80,00 - \text{Realisasi HKPPA}) \times 0,001$	80	80	Realisasi HKPPA = 80,00	70	70	Realisasi HKPPA = 70,00	100		120.00		20
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Konversi Indeks																										
100	100	Realisasi HKPPA = 90,00																										
$100 < X < 120$	$100 + \left(\frac{\text{Realisasi HKPPA} - 90}{10} \right) \times 2$	$(91,00 - \text{Realisasi HKPPA}) \times 0,001$																										
100	100	Realisasi HKPPA = 91,00																										
$80 < X < 100$	$80 + \left(\frac{\text{Realisasi HKPPA} - 80}{20} \right) \times 0,55$	$(80,00 - \text{Realisasi HKPPA}) \times 0,001$																										
80	80	Realisasi HKPPA = 80,00																										
70	70	Realisasi HKPPA = 70,00																										

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Devyanus Christofel Narisius Poli

Banjarmasin, 14 Desember 2024
Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Eric Tisnadi Prihndoko



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 240
SATUAN KERJA : 119855
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PAJAK
KALIMANTAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/25 2:54 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/25 8:54 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,094,112,000	751,428,000	718,688,000	0	718,688,000	95.64	32,740,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,094,112,000	751,428,000	718,688,000	0	718,688,000	95.64	32,740,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	107,644,000	89,212,000	75,480,000	0	75,480,000	84.61	13,732,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	107,644,000	89,212,000	75,480,000	0	75,480,000	84.61	13,732,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,201,756,000	840,640,000	794,168,000	0	794,168,000	94.47	46,472,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,172,294,000	1,330,447,000	1,328,807,476	0	1,328,807,476	99.88	1,639,524
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	315,530,000	308,829,000	292,765,812	0	292,765,812	94.8	16,063,188
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79,800,000	79,800,000	79,632,000	0	79,632,000	99.79	168,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	248,821,000	263,098,000	260,173,135	0	260,173,135	98.89	2,924,865
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,816,445,000	1,982,174,000	1,961,378,423	0	1,961,378,423	98.95	20,795,577
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	74,896,000	273,116,000	264,018,600	0	264,018,600	96.67	9,097,400
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	384,200,000	390,100,000	362,812,618	0	362,812,618	93.01	27,287,382
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	459,096,000	663,216,000	626,831,218	0	626,831,218	94.51	36,384,782
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	320,108,000	370,297,000	368,656,005	0	368,656,005	99.56	1,640,995
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	320,108,000	370,297,000	368,656,005	0	368,656,005	99.56	1,640,995
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	36,000,000	21,940,000	21,939,640	0	21,939,640	100	360
522112	Belanja Langganan Telepon	149,900,000	168,662,000	167,684,653	0	167,684,653	99.42	977,347
522113	Belanja Langganan Air	2,230,000	6,230,000	6,220,000	0	6,220,000	99.84	10,000
522141	Belanja Sewa	96,477,000	189,708,000	188,106,365	0	188,106,365	99.16	1,601,635
522151	Belanja Jasa Profesi	26,400,000	19,300,000	16,500,000	0	16,500,000	85.49	2,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	47,555,000	47,555,000	43,589,328	0	43,589,328	91.66	3,965,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	358,562,000	453,395,000	444,039,986	0	444,039,986	97.94	9,355,014
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41,309,000	41,309,000	41,308,928	0	41,308,928	100	72
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340,860,000	289,230,000	254,960,858	0	254,960,858	88.15	34,269,142

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 240
SATUAN KERJA : 119855
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PAJAK
KALIMANTAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/25 2:54 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/25 8:54 AM

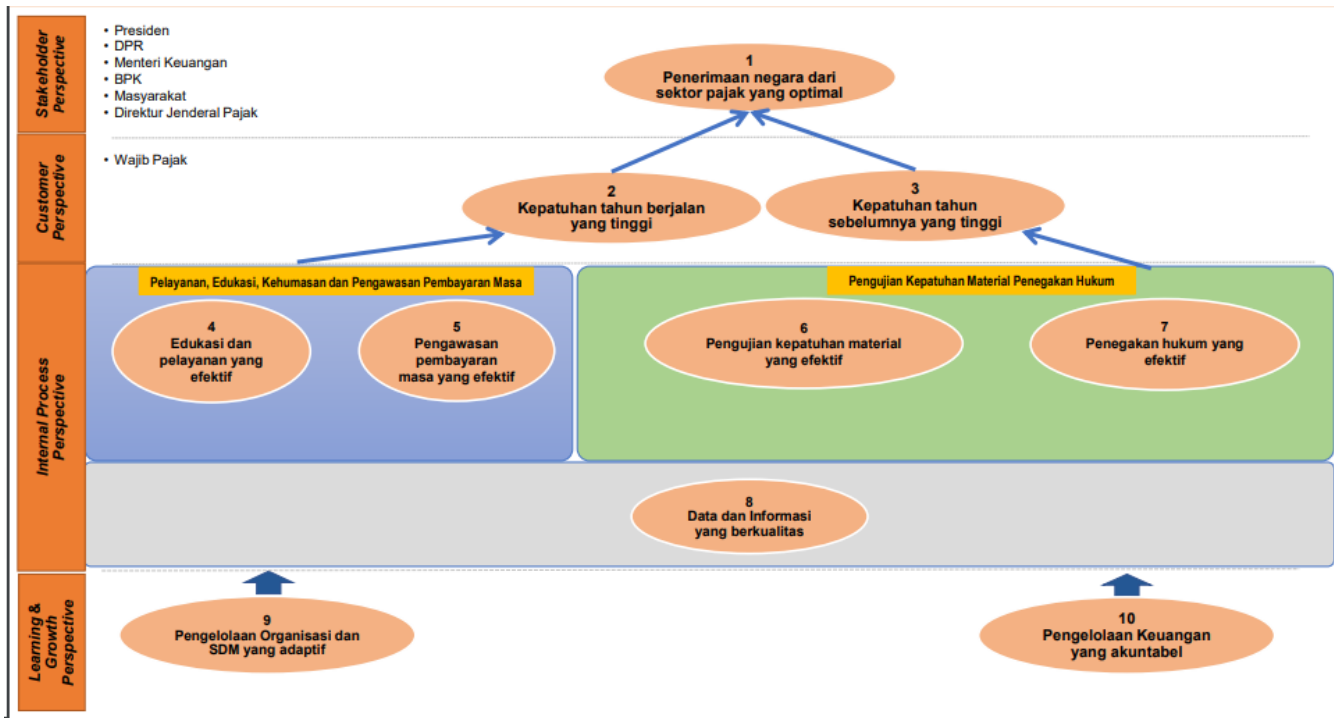
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	387,169,000	335,539,000	301,269,786	0	301,269,786	89.79	34,269,214
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,130,816,000	1,005,317,000	964,151,075	2,254,500	961,896,575	95.68	43,420,425
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	356,817,000	151,917,000	135,520,000	0	135,520,000	89.21	16,397,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,487,633,000	1,157,234,000	1,099,671,075	2,254,500	1,097,416,575	94.83	59,817,425
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,829,013,000	4,961,855,000	4,801,846,493	2,254,500	4,799,591,993	96.73	162,263,007
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	28,638,000	28,638,000	0	28,638,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	28,638,000	28,638,000	0	28,638,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	28,638,000	28,638,000	0	28,638,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	6,030,769,000	5,831,133,000	5,624,652,493	2,254,500	5,622,397,993	96.42	208,735,007



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-12/WPJ.29/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANJARMASIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.905.161.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1.068.076.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 208.632.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 628.453.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4.125.608.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.923.852.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.201.756.000
Total	Rp 6.030.769.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan
Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar

Banjarmasin , 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin,



Ditandatangani Secara Elektronik
Devyanus Christofel Narsizzus Polii



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELATAN DAN
TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Banjarmasin, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Banjarmasin,



Ditandatangani Secara Elektronik
Devyanus Christofel Narsizzus Polii



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Pengawasan pembayaran masa	Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak	Q1 : 1. Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBD, APBDes dan DIPA Instansi Vertikal belum optimal 2. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sectoral 3. Melakukan dinamisasi PPh pasal 25 4. Melakukan penelitian data matching 5. Melakukan pengumpulan data / KPDL 6. Menerbitkan STP	Q1 : 1. BA Rekon dan SP2DK 2. Laporan Visit dan SPD2DK Ekstensifikasi 3. Lhpt Dinamisasi PPh pasal 25 4. SP2DK tahun berjalan 5. Form Pengumpulan data (KPDL) 6. STP	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I-VI	-
				Q2 : 1. Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBD, APBDes dan DIPA	Q2 : 1. BA Rekon dan SP2DK 2. Laporan Visit dan SPD2DK Ekstensifikasi			

				Instansi Vertikal belum optimal 2. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sectoral 3. Melakukan dinamisasi PPh pasal 25 4. Melakukan penelitian data matching 5. Melakukan pengumpulan data / KPDL 6. Menerbitkan STP	3. Lhpt Dinamisasi PPh pasal 25 4. SP2DK tahun berjalan 5. Form Pengumpulan data (KPDL) 6. STP			
				Q3 : 1. Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBD, APBDes dan DIPA Instansi Vertikal belum optimal 2. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sectoral 3. Melakukan dinamisasi PPh pasal 25	Q3 : 1. BA Rekon dan SP2DK 2. Laporan Visit dan SPD2DK Ekstensifikasi 3. Lhpt Dinamisasi PPh pasal 25 4. SP2DK tahun berjalan 5. Form Pengumpulan data (KPDL) 6. STP			

				4. Melakukan penelitian data matching 5. Melakukan pengumpulan data / KPDL 6. Menerbitkan STP				
				Q4 : 1. Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBD, APBDes dan DIPA Instansi Vertikal belum optimal 2. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sectoral 3. Melakukan dinamisasi PPh pasal 25 4. Melakukan penelitian data matching 5. Melakukan pengumpulan data / KPDL 6. Menerbitkan STP	Q4 : 1. BA Rekon dan SP2DK 2. Laporan Visit dan SPD2DK Ekstensifikasi 3. Lhpt Dinamisasi PPh pasal 25 4. SP2DK tahun berjalan 5. Form Pengumpulan data (KPDL) 6. STP			

2	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan berakibat perubahan perilaku bayar dan lapor meningkat	Kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan yang efektif	Q1: 1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara langsung dan webinar 2. Melakukan koordinasi dengan AR serta P2Humas Kanwil terkait WP yang akan diberi edukasi dan penyuluhan one on one atas tindak lanjut DSPT Kolaboratif serta mengusulkan DSPT Mandiri 3. Melakukan kegiatan edukasi serta penyuluhan baik luring maupun daring melalui sosialisasi maupun kelas pajak (kegiatan one to many) 4. Melakukan kegiatan edukasi lainnya yang masuk pada kategori Tema 1, 2 dan Tema 3.	Q1: Laporan kegiatan (aplikasi SiSuluh)	Januari - Desember 2024	1. Seksi Pelayanan 2. KP2KP Marabahan	-
---	------------------------------------	--	---	--	--	-------------------------	--	---

				5. Melakukan kegiatan penyuluhan terkait Coretax.				
				Q2: 1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara langsung dan webinar 2. Melakukan koordinasi dengan AR serta P2Humas Kanwil terkait WP yang akan diberi edukasi dan penyuluhan one on one atas tindak lanjut DSPT Kolaboratif serta mengusulkan DSPT Mandiri 3. Melakukan kegiatan edukasi serta penyuluhan baik luring maupun daring melalui sosialisasi maupun kelas pajak (kegiatan one to many) 4. Melakukan kegiatan edukasi lainnya	Q2: Laporan kegiatan (aplikasi SiSuluh)			

				yang masuk pada kategori Tema 1, 2 dan Tema 3. 5. Melakukan kegiatan penyuluhan terkait Coretax.				
				Q3: 1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara langsung dan webinar 2. Melakukan koordinasi dengan AR serta P2Humas Kanwil terkait WP yang akan diberi edukasi dan penyuluhan one on one atas tindak lanjut DSPT Kolaboratif serta mengusulkan DSPT Mandiri 3. Melakukan kegiatan edukasi serta penyuluhan baik luring maupun daring melalui sosialisasi maupun kelas pajak (	Q3: Laporan kegiatan (aplikasi SiSuluh)			

				kegiatan one to many) 6. Melakukan kegiatan edukasi lainnya yang masuk pada kategori Tema 1, 2 dan Tema 3.				
				Q4 : 1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara langsung dan webinar 2. Melakukan koordinasi dengan AR serta P2Humas Kanwil terkait WP yang akan diberi edukasi dan penyuluhan one on one atas tindak lanjut DSPT Kolaboratif serta mengusulkan DSPT Mandiri 3. Melakukan kegiatan edukasi serta penyuluhan baik luring maupun daring melalui sosialisasi maupun kelas pajak (	Q4: Laporan kegiatan (aplikasi SiSuluh)			

				kegiatan one to many) 4. Melakukan kegiatan edukasi lainnya yang masuk pada kategori Tema 1,2 dan Tema 3.				
3	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Pengujian kepatuhan material	Meningkatkan kepatuhan pajak	Q1 : 1. Menerbitkan STP selain tahun berjalan 2. Penyusunan DPP Kolaboratif semester I 3. Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan 4. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan (dengan mengoptimalkan CRM dan IRE)	Q1 : 1. STP 2. Berita acara penetapan DPP Kolaboratif 3. SP2DK selain tahun berjalan 4. SP2DK 5. ND usulan Pemeriksaan data konkret 6. ND Usulan pemeriksaan khusus 7. ND Usulan Penilaian	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I-VI	-

				5. Melakukan pemeriksaan data konkret 6. Mengirim usulan pemeriksaan khusus. 7. Mengirimkan usulan penilaian 8. Penyusunan dan Pembahasan DSPP	8. Berita acara / usulan DSPP			
				Q2 : 1. Menerbitkan STP selain tahun berjalan 2. Penyusunan DPP Kolaboratif semester I 3. Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan 4. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan (dengan mengoptimalkan CRM dan IRE) 5. Melakukan pemeriksaan data konkret 6. Mengirim usulan pemeriksaan khusus.	Q2 : 1. STP 2. Berita acara penetapan DPP Kolaboratif 3. SP2DK selain tahun berjalan 4. SP2DK 5. ND usulan Pemeriksaan data konkret 6. ND Usulan pemeriksaan khusus 7. ND Usulan Penilaian 8. Berita acara / usulan DSPP			

				7. Mengirimkan usulan penilaian 8. Penyusunan dan Pembahasan DSPP				
				Q3 : 1. Menerbitkan STP selain tahun berjalan 2. Penyusunan DPP Kolaboratif semester I 3. Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan 4. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan (dengan mengoptimalkan CRM dan IRE) 5. Melakukan pemeriksaan data konkret 6. Mengirim usulan pemeriksaan khusus. 7. Mengirimkan usulan penilaian 8. Penyusunan dan Pembahasan DSPP	Q3: 1. STP 2. Berita acara penetapan DPP Kolaboratif 3. SP2DK selain tahun berjalan 4. SP2DK 5. ND usulan Pemeriksaan data konkret 6. ND Usulan pemeriksaan khusus 7. ND Usulan Penilaian 8. Berita acara / usulan DSPP			

				Q4 : 1. Menerbitkan STP selain tahun berjalan 2. Penyusunan DPP Kolaboratif semester I 3. Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan 4. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan (dengan mengoptimalkan CRM dan IRE) 5. Melakukan pemeriksaan data konkret 6. Mengirim usulan pemeriksaan khusus. 7. Mengirimkan usulan penilaian 8. Penyusunan dan Pembahasan DSPP	Q4 : 1. STP 2. Berita acara penetapan DPP Kolaboratif 3. SP2DK selain tahun berjalan 4. SP2DK 5. ND usulan Pemeriksaan data konkret 6. ND Usulan pemeriksaan khusus 7. ND Usulan Penilaian 8. Berita acara / usulan DSPP			
4	Data dan informasi yang berkualitas	1. KPDL 2. Penghimpunan data regional dari ILAP	Data potensi pajak yang akurat dan Informasi yang berkualitas	Q1 : 1. Melakukan pengumpulan data / KPDL 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota	Q1 : 1. Form Pengumpulan data (KPDL) 2. Data utama regional.	Januari - Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I-VI. 2. Seksi PKD	-

				Banjarmasin dan Pemerintah Daerah Barito Kuala terkait permintaan data ILAP 3. Melakukan penelitian kelengkapan elemen data yang telah diterima.				
				Q2: 1. Melakukan pengumpulan data / KPDL 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Daerah Barito Kuala terkait permintaan data ILAP 3. Melakukan penelitian kelengkapan elemen data yang telah diterima.	Q2: 1. Form Pengumpulan data (KPDL) 2. Data utama regional.			
				Q3: 1. Melakukan pengumpulan data / KPDL 2. Melakukan koordinasi dengan	Q3: 1. Form Pengumpulan data (KPDL) 2. Data utama regional.			

				Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Daerah Barito Kuala terkait permintaan data ILAP 3. Melakukan penelitian kelengkapan elemen data yang telah diterima.				
				Q4 : 1. Melakukan pengumpulan data / KPDL 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Daerah Barito Kuala terkait permintaan data ILAP 3. Melakukan penelitian kelengkapan elemen data yang telah diterima.	Q4: 1. Form Pengumpulan data (KPDL) 2. Data utama regional.			
5	Penegakan hukum yang efektif	Pemeriksaan pajak yang efektif	1. Penerbitan SKP berdasarkan	Q1: 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan	Q1: 1. Surat Pemberitahuan	Januari S.d Desember 2024	Fungsional Pemeriksa Pajak	-

			potensi yang sesungguhnya 2. SKP yang diterbitkan disetujui oleh wajib Pajak 3. Penyelesaian LHP sesuai target 4. Penyelesaian LHP tepat waktu 5. Penyelesaian restitusi berdasarkan bukti kompeten	Pemeriksaan dan Panggilan Pertemuan 2. Membuat Surat Peminjaman, Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Memeriksa buku catatan, catatan dan dokumen wajib pajak 4. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 5. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak	Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan 2. Surat Peminjaman, Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Buku catatan, catatan dan dokumen wajib pajak telah diperiksa 4. Kertas Kerja Pemeriksaan 5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak			
				Q2: 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Panggilan Pertemuan 2. Membuat Surat Peminjaman, Berita Acara Pemenuhan	Q2: 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan 2. Surat Peminjaman, Berita Acara			

				Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Memeriksa buku catatan, catatan dan dokumen wajib pajak 4. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 5. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak.	Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Buku catatan, catatan dan dokumen wajib pajak telah diperiksa 4. Kertas Kerja Pemeriksaan 5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak			
				Q3: 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Panggilan Pertemuan 2. Membuat Surat Peminjaman, Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Memeriksa buku catatan, catatan dan dokumen wajib pajak 4. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan	Q3: 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan 2. Surat Peminjaman, Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Buku catatan, catatan dan			

				5. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak	dokumen wajib pajak telah diperiksa 4. Kertas Kerja Pemeriksaan. 5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak			
				Q4: 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Panggilan Pertemuan 2. Membuat Surat Peminjaman, Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Memeriksa buku catatan, catatan dan dokumen wajib pajak 4. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan 5. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak	Q4: 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan 2. Surat Peminjaman, Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen 3. Buku catatan, catatan dan dokumen wajib pajak telah diperiksa 4. Kertas Kerja Pemeriksaan			

					5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak			
6	Penegakan Hukum yang Efektif	Identifikasi Ketetapan, Konseling Wajib Pajak, Intensifikasi Kegiatan Penagihan Aktif, intensifikasi PBB	Penerimaan negara tercapai	Q1: 1. Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan. 2. Menyusun dan menindaklanjuti DSPP, DSPPn, DSPc. 3. Melaksanakan konseling penagihan pajak. 4. Menindaklanjuti SPOP PBB.	Q1: 1. Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir, BA Sita, BA Penjualan Barang Sita dan BA Cegah,. 2. BA DSPP dan DSPc. 3. Surat pernyataan komitmen pembayaran utang pajak. 4. SPPT PBB.	Januari - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	-
				Q2: 1. Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan.	Q2: 1. Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir, BA Sita, BA Penjualan Barang Sita dan BA Cegah,.			

				2. Menyusun dan menindaklanjuti DSPP, DSPPn, DSPc 3. Melaksanakan konseling penagihan pajak.	2. BA DSPP dan DSPc. 3. Surat pernyataan komitmen pembayaran utang pajak.			
				Q3: 1. Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan. 2. Menyusun dan menindaklanjuti DSPP, DSPPn, DSPc. 3. Melaksanakan konseling penagihan pajak.	Q3: 1. Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir, BA Sita, BA Penjualan Barang Sita dan BA Cegah,. 2. BA DSPP dan DSPc. 3. Surat pernyataan komitmen pembayaran utang pajak.			
				Q4: 1. Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan.	Q4: 1. Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, BA Blokir, BA Sita, BA Penjualan Barang Sita dan BA Cegah,.			

				2. Menyusun dan menindaklanjuti DSPP, DSPPn, DSPc. 3. Melaksanakan konseling penagihan pajak.	2. BA DSPP dan DSPc. 3. Surat pernyataan komitmen pembayaran utang pajak.			
7	Persentase Pegawai yang Memenuhi standar Kompetensi	Setiap atasan melakukan coaching, konseling, dan evaluasi atas kinerja bawahan	Coaching, konseling, dan Mentoring	Q1 : Pengembangan Kompetensi.	Q1 : Coaching, Konseling, dan Mentoring	Januari S.d Desember 2024	Subbagian Umum dan KI	-
				Q2 : Pengembangan Kompetensi.	Q2 : Coaching, Konseling, dan Mentoring			
				Q3 : Pengembangan Kompetensi.	Q3 : Coaching, Konseling, dan Mentoring			
				Q4 : Pengembangan Kompetensi.	Q4 : Coaching, Konseling, dan Mentoring			
8	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	Melaksanakan DKO dan MR tepat waktu	Laporan NKO, DKO dan Laporan MR	Q1 : Mengadakan Rapat DKO dan MR setiap triwulan	Q1 : Laporan DKO dan Laporan MR	Januari S.d Desember 2024	Subbagian Umum dan KI	-
				Q2 : Mengadakan Rapat DKO dan MR setiap triwulan	Q2 : Laporan DKO dan Laporan MR			
				Q3 : Mengadakan Rapat DKO dan MR setiap triwulan	Q3 : Laporan DKO dan Laporan MR			
				Q4 : Mengadakan Rapat DKO dan MR setiap triwulan	Q4 : Laporan DKO dan Laporan MR			

9	Indeks Penilaian Integritas Unit	Menandatangani Pakta Integritas pada Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian, Seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan dan melakukan monitoring terhadap pegawai yang terkait dengan fungsi KPP	Pakta Integritas dan Laporan Pemantauan Kode Etik dan Perilaku	Q1 : Pemantauan Kode Etik dan Perilaku	Q1 : Pakta Integritas dan Laporan Pemantauan Kode Etik dan Perilaku	Januari S.d Desember 2024	Subbagian Umum dan KI	-
				Q2 : Pemantauan Kode Etik dan Perilaku	Q2 : Pakta Integritas dan Laporan Pemantauan Kode Etik dan Perilaku			
				Q3 : Pemantauan Kode Etik dan Perilaku	Q3 : Pakta Integritas dan Laporan Pemantauan Kode Etik dan Perilaku			
				Q4 : Pemantauan Kode Etik dan Perilaku	Q4 : Pakta Integritas dan Laporan Pemantauan Kode Etik dan Perilaku			
10	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Melakukan perencanaan kebutuhan belanja barang/modal dan Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran.	Penyerapan, efisiensi dan Konsistensi Pelaksanaan Anggaran, Penyusunan RKA/KL Y+2	Q1 : Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.	Q1 : Laporan Keuangan Semester 2 Tahun Y-1, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), RKA/KL Y+2	Januari S.d Desember 2024	Subbagian Umum dan KI	-
				Q2: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Q2: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)			
				Q3 : Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.	Q3: Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Y, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)			

				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Q2: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)			
--	--	--	--	-----------------------------------	---	--	--	--

Banjarmasin, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Banjarmasin,



Ditandatangani Secara Elektronik
Devyanus Christofel Narsizzus Polii



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Devyanus Christofel Narsizzus Polii		NAMA	Syamsinar
NIP	19700329 199603 1 001		NIP	19700414 199503 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IV.b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)			
B. TAMBAHAN			

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Devyanus Christofel Narsizzus Polii
19700329 199603 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Syamsinar
19700414 199503 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA										
1.	101 pegawai									
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.									
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN										
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan									
	No	IKI	Target	Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100	
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%		



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Devyanus Christofel Narsizzus Polii
19700329 199603 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Syamsinar
19700414 199503 2 001

